

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan pemikiran-pemikiran terkait permasalahan yang akan datang, sesuai dengan permasalahan yang disebutkan dalam artikel ini, tanggung jawab sosial perusahaan dan aktivitas keuangan. Dalam tinjauan pustaka ini disajikan teori-teori terkait variabel masalah yang muncul. Konsep penelitian ini merupakan kajian ilmiah dari para ahli, mulai dari pengertian umum hingga pemahaman topik yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

##### **2.1.1 Kepemilikan Manajerial**

###### **2.1.1.1 Pengertian Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Adanya kepemilikan manajerial menjadi hal yang menarik jika dikaitkan dengan agency theory. Kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham

perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut juga sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Erawati & Sari, 2021).

Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai tingkat kepemilikan saham pihak (Dermayanti & gunawan, 2018) manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya seperti direktur, manajemen, dan komisaris. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi di mana pihak manajemen perusahaan memiliki rangkap jabatan yaitu jabatannya sebagai manajemen perusahaan dan juga pemegang saham dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan (Erawati & Sari, 2021)

Kepemilikan saham oleh manajerial akan mempengaruhi kinerja manajemen dalam mengoptimalkan perusahaan. Hal ini akan berpengaruh positif terhadap kelangsungan hidup perusahaan. bahwa kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris. kepemilikan manajerial adalah pemilik/pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan Perusahaan.

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Adanya kepemilikan

manajerial menjadi hal yang menarik jika dikaitkan dengan agency theory. Kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut juga sekaligus sebagai pemegang saham Perusahaan (Melinta, 2022).

Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya seperti direktur, manajemen, dan komisaris. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi dimana pihak manajemen perusahaan memiliki rangkap jabatan yaitu jabatannya sebagai manajemen perusahaan dan juga pemegang saham dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan, (Melinta, 2022).

#### **2.1.1.2 Tujuan Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial, yang sekaligus direktur eksekutif merupakan pemegang saham yang menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan pemegang saham. Bahkan diperusahaan yang tidak dikelola, direktur bukanlah pemegang saham. Ketika menjalankan bisnis, manajer tidak bekerja untuk meningkatkan para pemegang saham, namun tergoda untuk meningkatkan kesejahteraan mereka kesejahteraan. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Permasalahan yang timbul dari pembagian fungsi kepemilikan dan manajemen dalam teori keuangan dikenal dengan istilah konflik institusional (Luciana, 2020).

Tanggung jawab kepemilikan manajerial adalah konsep dalam hukum dan tata kelola perusahaan yang mentaur peran tanggung jawab manajer atau pemilik dalam mengelola perusahaan. Pemilik dan manajer bertanggung jawab atas pengelolaan aset keuangan perusahaan dengan benar. Ini termasuk mengelola utang, investasi, pengeluaran, dan perencanaan keuangan yang efektif. Selain berfokus pada produktivitas, perusahaan harus bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Hal ini mencakup praktik bisnis yang berkelanjutan, beretika, dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan (Mairiza Selvia et al., 2022).

#### **2.1.1.3 Pengukuran Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial menunjukkan bahwa adanya peran ganda seorang manajer, yakni manajer bertindak juga sebagai pemegang saham. Sebagai seorang manajer dan sekaligus pemegang saham, ia tidak ingin perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan. Kesulitan keuangan atau kebangkrutan usaha akan merugikan ia baik sebagai manajer atau sebagai pemegang saham. Sebagai manajer akan kehilangan insentif dan sebagai pemegang saham akan kehilangan return bahkan dana yang diinvestasikannya. Cara untuk menurunkan resiko ini adalah dengan menurunkan tingkat debt yang dimiliki perusahaan (Tadi, 2019).

Semakin tinggi tingkat pengendalian suatu perusahaan, maka semakin besar pula kendali yang dimilikinya terhadap kepentingan pemegang saham itu sendiri. Representasi kepemilikannya adalah penggunaan presentase kepemilikan direksi,

komisaris dan manajer harian atas saham yang ada (Kurniasih & Rachmadita, 2020). Kepemilikan manajerial dihitung dengan rumus:

$$MNJR = \frac{\text{Jumlah Saham Direksi, Komisaris dan Manajer}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

Penelitian dikemukakan oleh (Yuniati, 2022), Rachman (2016), besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dengan shareholders. Semakin meningkatnya proporsi kepemilikan manajerial maka akan semakin baik kinerja perusahaan sehingga manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya untuk perusahaan.

## **2.1.2 Kepemilikan Institusional**

### **2.1.2.1 Pengertian Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah merupakan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan presentase. Kepemilikan institusional adalah presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, dana pensiun, atau perusahaan lain (Nabila, 2021).

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat meminimalisir tingkat penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan (Rusialati, 2019).

Kepemilikan institusional adalah merupakan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan presentase, Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan blockholders pada akhir tahun. Yang dimaksud institusi adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan. Sedangkan yang dimaksud blockholders adalah kepemilikan individu atas nama perorangan di atas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang saham blockholders dimasukkan dalam kepemilikan institusional karena pemegang saham blockholders dengan kepemilikan saham di atas 5% memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham di bawah 5% (Putra et al., 2019)

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Beberapa kelebihan dari struktur kepemilikan institusional sebagai berikut (Karima et al., 2005):

- Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
- Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

#### **2.1.2.2 Tujuan Kepemilikan Intitusional**

Kepemilikan institusional mewakili suatu sumber kekuasaan (source of power) yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap

keberadaan manajemen. Kepemilikan institusional mewakili suatu sumber kekuasaan (source of power) yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Beberapa kelebihan dari struktur kepemilikan institusional sebagai berikut (Sembiring, 2020):

- Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
- Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih atas aktivitas yang terjadi didalam perusahaan.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional maka akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap operasional perusahaan yang lebih optimal. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawasan ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal (Cristofel & Kurniawati, 2021).

### **2.1.2.3 Pengukuran Kepemilikan Institusional**

Menurut (Dermayanti & gunawan, 2018) kepemilikan institusional adalah tingkat kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan, diukur oleh proposi saham yang dimiliki oleh institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam

persentase. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer. Menurut (Patrisia et al., 2019), kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusi dalam suatu perusahaan. Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah Saham Yang Dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

(Niken, 2020) Kepemilikan institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan bertindak sebagai pihak yang memonitor manajemen perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan maka akan mengurangi perilaku oportunistik (mengambil keuntungan sendiri) manajer dalam melakukan kecurangan yang dapat menyebabkan agency conflict. Semakin besar kepemilikan institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan, semakin besar peran suara dan dorongan institusi dalam pengambilan keputusan untuk mengawasi manajemen, serta dapat memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan.

Penelitian dikemukakan Cornett et al (2017) dalam studinya menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki hubungan yang positif dengan kinerja perusahaan meskipun secara signifikan hubungan tersebut ditemukan hanya pada investor yang tidak memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya.

### **2.1.3 Kepemilikan Publik**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kepemilikan Publik**

Menurut (Badjuri, 2021) Kepemilikan publik adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat terhadap saham perusahaan. Ketika suatu perusahaan dimiliki oleh publik maka akan mendorong perusahaan tersebut untuk melakukan implementasi *corporate social responsibility disclosure* lebih luas terhadap sosial dan lingkungan dengan tujuan mendapatkan dan meningkatkan rasa kepercayaan dan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap aktivitas yang mereka jalankan kepada para pemegang saham.

Kemudian menurut (Hartono, 2016) menyatakan bahwa perusahaan yang sahamnya banyak dimiliki publik menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi dimata masyarakat dalam memberikan imbalan yang layak dan dianggap mampu beroperasi terus menerus (*going concern*) sehingga cenderung akan melakukan tanggung jawab sosial lebih luas. Perusahaan dengan porsi kepemilikan publik lebih luas akan cenderung melakukan lebih banyak

impelentasi sosial karena dinilai memiliki tanggung jawab secara moral kepada masyarakat.

Berdasarkan teori stakeholders menurut (Gustia, 2021) menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi para stakeholders. Stakeholders merupakan setiap kelompok orang baik yang berada di dalam perusahaan maupun diluar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Kepemilikan publik merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat luas dan bukan hanya dimiliki oleh manajemen perusahaan. Dengan beredarnya saham perusahaan yang dimiliki publik maka manajemen perusahaan akan terus berupaya menunjukkan kinerja terbaik bagi para pemangku kepentingan salah satunya melalui tanggung jawab sosial perusahaan sehingga perusahaan mendapatkan citra positif dari publik.

Menyatakan bahwa perusahaan yang sahamnya banyak dimiliki publik menunjukkan perusahaann tersebut memiliki kredibilitas yang dimiliki publik menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi dimata masyarakat dalam memberikan imbalan yang layak dan dianggap mampu beroperasi terus menerus (*going concern*) sehingga cenderung akan melakukan tanggung jawab sosial lebih luas. Perusahaan dengan porsi kepemilikan publik lebih luas akan cenderung melakukan lebih banyak impelentasi sosial karena dinilai memiliki tanggung jawab secara moral kepada masyarakat (Firdausi, 2020).

### 2.1.1.1 Pengukuran Kepemilikan Publik

Untuk mengukur kepemilikan publik suatu perusahaan, menurut (Umar et al., 2022) menyatakan untuk mengukur kepemilikan saham publik yaitu diukur dengan proporsi jumlah saham yang dimiliki publik terhadap total saham secara keseluruhan. Kepemilikan publik dihitung dengan rumus:

$$KP = \frac{\text{Jumlah Saham Yang Dimiliki Publik}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

### 2.1.4 *Corporate Social Responsibility Disclosure*

#### 2.1.4.1 *Pengertian Corporate Social Responsibility Disclosure*

*Corporate Social Responsibility Disclosure* menurut (Gustia, 2021) adalah sebagai berikut:

“Sebagai upaya dari perusahaan untuk menaikkan citranya di mata public dengan membuat program-program amal baik yang bersifat eksternal maupun internal. Program eksternal dengan menjalankan kemitraan (Partnership) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan secara internal mampu memproduksi dengan baik, mencapai profit yang maksimal dan mensejahterakan karyawannya.”

Menurut (Said, 2021) *Corporate Social Responsibility Disclosure* adalah sebagai berikut:

“CSR bisa dikatakan komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.”

#### **2.1.4.2 Komponen-komponen *Corporate Social Responsibility Disclosure***

Menurut (Kusuma et al., 2021) Komponen *Corporate Social Responsibility Disclosure* sebagai berikut.

##### **1. Hak Asasi Manusia (HAM)**

Perusahaan harus menanggapi masalah yang bersangkutan dengan HAM. Perusahaan juga harus bisa mencari cara untuk dapat terhindar dari pelanggaran HAM.

##### **2. Tenaga Kerja (Buruh)**

Perusahaan harus bisa memberikan Privilege untuk para tenaga kerjanya dari mulai gaji yang sesuai umur, keselamatan kerja, kesehatan, kesejahteraan hari tua, dan sebagainya.

##### **3. Lingkungan Hidup**

Perusahaan harus bisa membuat strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Perusahaan harus bisa mencari solusi untuk mengatasi dampak negatif dari aktivitas perusahaan.

##### **4. Sosial-Masyarakat**

Perusahaan harus membuat semacam strategi baik di dalam bidang sosial dan juga cara mengembangkannya dimasyarakat sekitar perusahaan.

##### **5. Dampak Produk dan Jasa terhadap Pelanggan**

Perusahaan harus memastikan keamanan produk dan jasa yang mereka jual terbebas dari dampak-dampak negatif yang dapat mempengaruhi kesehatan, dan sebagainya.

### **2.1.1.3 Manfaat Menerapkan *Corporate Social Responsibility Disclosure***

*Corporate Social Responsibility Disclosure* merupakan salah satu skema yang dibuat perusahaan sebagai bisnis baik itu dalam jangka panjang maupun pendek. Menurut (Kusuma et al., 2021) manfaat yang didapatkan jika dilakukannya *Corporate Social Responsibility Disclosure* dalam perusahaan, sebagai berikut:

1. Mempertahankan reputasi dan nama baik perusahaan.
2. Perusahaan mendapatkan izin beroperasi.
3. Mereduksi bisnis perusahaan.
4. Meluaskan jalan masuk bagi sumber daya yang akan digunakan oleh operasional.
5. Membuka peluang bagi perusahaan untuk mempromosikan diri di kanca yang lebih besar dan luas.
6. Memotong biaya, contohnya dengan dampak dari pembangunan limbah.
7. Memperbaiki hubungan bisnis dengan para investor dan juga dengan para regulator.

Dengan adanya *Corporate Social Responsibility Disclosure* ini akan lebih mempermudah dalam membuat suatu keseimbangan antara perusahaan, masyarakat sekitar, dan juga lingkungan.

### **2.1.1.4 Pengukuran *Corporate Social Responsibility Disclosure***

Pengukuran *Corporate Social Responsibility Disclosure* ini bisa menggunakan proksi *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* yang berdasarkan dengan indikator GRI (*Global Reporting Initiatives*). *Corporate Social*

*Responsibility Disclosure* ini pada dasarnya menggunakan pendekatan dengan pembagian 2 kelompok, yang setiap item *Corporate Social Responsibility Disclosure* dalam penelitian akan diberi nilai 1 jika perusahaan menggunakan *Corporate Social Responsibility Disclosure* dan nilai 0 jika perusahaan tidak mengungkapkan *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

Menurut (Shafamega, 2021), Pengukuran pengungkapan *Corporate Social Responsibility Disclosure* ini bisa menggunakan rumus seperti dibawah ini:

$$CSRIj = \frac{\sum X_{ij}}{N_j}$$

Keterangan:

*CSRIj* : *Corporate Social Responsibility Disclosure* Index perusahaan

$\sum X_{ij}$  : Jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan

$N_j$  : Jumlah item yang seharusnya diungkapkan,  $n_j=113$

Salah satu indikator yang digunakan saat ini adalah standar GRI. Standar GRI ini merupakan suatu praktik yang terbaik secara global untuk melaporkan berbagai dampak dari mulai ekonomi, lingkungan, dan sosial secara publik. Standar GRI ini juga dapat digunakan semua maupun sebagian sesuai kebutuhan untuk melaporkan informasi secara spesifik. Seperti penjelasan dibawah ini, yaitu:

1. Standar GRI 102 dengan 33 item pengungkapan.
2. Standar GRI 103 dengan 3 item pengungkapan.
3. Standar GRI 200 dengan 13 item pengungkapan.
4. Standar GRI 300 dengan 30 item Pengungkapan.
5. Standar GRI 400 dengan 34 item pengungkapan.

Dibawah ini, penjelasan mengenai indikator standar GRI dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1 Indikator**  
*Corporate Social Responsibility Disclosure Index*

No	Pengungkapan Standar GRI	Indikator Pengungkapan
<b>GRI 102</b>		
<b>Profil Organisasi</b>		
1	GRI 102-1	Nama Organisasi
2	GRI 102-2	Kegiatan, Merek, Produk, dan Jasa
3	GRI 102-3	Lokasi Kantor Pusat
4	GRI 102-4	Lokasi Oprasi
5	GRI 102-5	Kepemilikan dan Bentuk Hukum
6	GRI 102-6	Pasar yang di layani
7	GRI 102-7	Skala Organisasi
8	GRI 102-8	Informasi mengenai karyawan dan pekerja lain
9	GRI 102-9	Rantai Pasokan
10	GRI 102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya
11	GRI 102-11	Pendekatan atau prinsip pencegahan
12	GRI 102-12	Inisiatif Eksternal
13	GRI 102-13	Keanggotan Asosiasi
<b>Strategi</b>		
14	GRI 102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior
<b>Etika &amp; Integritas</b>		
No	Pengungkapan Standar GRI	Indikator Pengungkapan
15	GRI 102-16	Nilai, Prinsip, standar, dan norma perilaku
<b>Tata Kelola</b>		

No	Pengungkapan Standar GRI	Indikator Pengungkapan
16	GRI 102-18	Struktur tata kelola
<b>Ketertiban Pemangku Kepentingan</b>		
17	GRI 102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan
18	GRI 102-41	Perjanjian perundingan kolektif
19	GRI 102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan
20	GRI 102-43	Pendekatan terhadap ketertiban pemangku kepentingan
21	GRI 102-44	Topik utama dan masalah yang dikemukakan
<b>Praktik Pelaporan</b>		
22	GRI 102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi
23	GRI 102-46	Menetapkan isi laporan dan batasan topik
24	GRI 102-47	Daftar topik material
25	GRI 102-48	Penyajian kembali informasi
26	GRI 102-49	Perubahan dalam pelaporan
27	GRI 102-50	Periode pelaporan
28	GRI 102-51	Tanggal laporan terbaru
29	GRI 102-52	Siklus pelaporan
30	GRI 102-53	Titik kontak untuk pernyataan mengenai laporan
31	GRI 102-54	Klaim bahwa pelaporan sesuai dengan standar GRI
32	GRI 102-55	Klaim bahwa pelaporan sesuai dengan standar GRI
33	GRI 102-56	Assurance dari pihak eksternal
<b>GRI 103</b>		
<b>Pendekatan Manajemen</b>		
1	GRI 103-1	Assurance dari pihak eksternal
2	GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya

No	Pengungkapan Standar GRI	Indikator Pengungkapan
3	GRI 103-3	Evaluasi pendekatan manajemen
<b>GRI 201</b>		
<b>Performa Ekonomi</b>		
1	GRI 201-1	Nilai ekonomi langsung yang diatribusikan
2	GRI 201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang akibat dari perubahan iklim
3	GRI 201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya
4	GRI 201-4	Bantuan finansial yang diterima pemerintah
<b>Keberadaan Pasar</b>		
5	GRI 202-1	Rasio standar upah karyawan entry level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minuman regional
6	GRI 202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal
<b>Dampak Ekonomi Tidak Langsung</b>		
7	GRI 203-1	Inventasi infrastruktur dan dukungan layanan
8	GRI 203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan
<b>Peraktik Pengadaan</b>		
9	GRI 204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal
<b>Anti Korupsi</b>		
10	GRI 205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi
11	GRI 205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan prosedur anti korupsi
12	GRI 205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
<b>Perilaku Anti Persaingan</b>		
13	GRI 206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti persaingan, praktik anti- <i>trust</i> dan monopoli
<b>GRI 300</b>		
<b>Material</b>		

No	Pengungkapan Standar GRI	Indikator Pengungkapan
1	GRI 301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume
2	GRI 301-2	Material <i>input</i> dari daur ulang yang digunakan
3	GRI 301-3	Produk reclaimed dan material kemasannya
<b>Energi</b>		
4	GRI 302-1	Konsumsi energi dalam organisasi
5	GRI 302-2	Konsumsi energi di luar organisasi
6	GRI 302-3	Intensitas energi
7	GRI 302-4	Pengurangan konsumsi energi
8	GRI 302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa
<b>Air</b>		
9	GRI 303-1	Pengambilan air berdasarkan sumber
10	GRI 303-2	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
11	GRI 303-3	Daur ulang dan penggunaan air kembali
<b>Keanekaragaman Hayati</b>		
12	GRI 304-1	Lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
13	GRI 304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati
14	GRI 304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi
15	GRI 304-4	Spesies daftar merah ICUN dan spesies daftar konservasi nasional dengan batitad dalam wilayah yang terkena efek operasi
<b>Emisi</b>		
16	GRI 305-1	Emisi GRK (cakupan 1) langsung
17	GRI 305-2	Emisi GRK (cakupan 2) langsung
18	GRI 305-3	Emisi GRK (cakupan 3) tidak langsung lainnya

No	Pengungkapan Standar GRI	Indikator Pengungkapan
19	GRI 305-4	Intensitas emisi GRK
20	GRI 305-5	Pengurangan emisi GRK
21	GRI 305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS)
22	GRI 305-7	Nitrogen oksida, sulfur oksida, dan emisi udara yang signifikan lainnya
<b>Air Limbah dan Limbah</b>		
23	GRI 306-1	Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan
24	GRI 306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
25	GRI 306-3	Tumpahan yang signifikan
26	GRI 306-4	Pengangkutan limbah berbahaya
27	GRI 306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/ atau limbah air
<b>Kepatuhan</b>		
28	GRI 307-1	Ketidak pathuan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup
<b>Penilaian Lingkungan Pemasok</b>		
29	GRI 308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan
30	GRI 308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
<b>GRI 400</b>		
<b>Kepegawaian</b>		
1	GRI 401-1	Peraturan karyawan baru dan pergantian karyawan
2	GRI 401-2	Tunjangan yang diberikan kepada masyarakat sementara atau cuti paruh waktu
3	GRI 401-3	Cuti melahirkan
<b>Hubungan Tenaga Kerja atau Manajemen</b>		
4	GRI 402-1	Periode pemberitahuan terkait perubahan operasional
<b>Kesehatan dan Keselamatan Kerja</b>		

No	Pengungkapan Standar GRI	Indikator Pengungkapan
5	GRI 403-1	Perwakilan pekerja dalam komite resmi gabungan manajemen-pekerjaan untuk kesehatan dan keselamatan
6	GRI 403-2	Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja, penyakit akibat pekerjaan, hari kerja yang hilang, dan ketidak hadiran, serta jumlah kematian terkait pekerjaan
7	GRI 403-3	Para pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit berbahaya tinggi terkait dengan pekerjaan mereka
8	GRI 403-4	Topik kesehatan dan keselamatan tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat buruh
<b>Pelatihan dan Pelantikan</b>		
9	GRI 404-1	Rata-rata pelatihan pertahunan karyawan
10	GRI 404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan
11	GRI 404-3	Presentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier
<b>Keanekaragaman dan Keselamatan Kerja</b>		
12	GRI 405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan
13	GRI 405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan dengan laki-laki
<b>Non Diskriminasi</b>		
14	GRI 406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan dan dilakukan
<b>Kebebasan Berserikat &amp; Perundingan Kolektif</b>		
15	GRI 407-1	Operasi dan pemasok dimana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko
<b>Pekerja Anak</b>		
16	GRI 408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak
<b>Kerja Paksa atau Wajib Kerja</b>		
17	GRI 409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja
<b>Peraktik Keamanan</b>		

No	Pengungkapan Standar GRI	Indikator Pengungkapan
18	GRI 410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
<b>Hak-hak Masyarakat Adat</b>		
19	GRI 411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat
<b>Penilaian Hak Asasi Manusia</b>		
20	GRI 412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia tau atau penilaian dampak
21	GRI 412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
22	GRI 412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia
<b>Masyarakat Lokal</b>		
23	GRI 413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan
24	GRI 413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal
<b>Penilaian Sosial Pemasok</b>		
25	GRI 414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial
26	GRI 414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
<b>Kebijakan Publik</b>		
27	GRI 415-1	Kontribusi publik
<b>Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan</b>		
28	GRI 416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan kerja dari berbagai kategori produk dan jasa
29	GRI 416-1	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa
<b>Pemasaran dan Pelabelan</b>		
30	GRI 417-1	Persyaratan untuk pelebelan dan informasi produk dan jasa
31	GRI 417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait pelebelan dan informasi produk dan jasa

No	Pengungkapan Standar GRI	Indikator Pengungkapan
32	GRI 417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran
<b>Privasi Pelanggan</b>		
33	GRI 418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggan dan hilangnya data pelanggan
<b>Kepatuhan Ekonomi</b>		
34	GRI 419-1	Ketidak patuhan terhadap undang-undang dan peraturan dibidang sosial dan ekonomi

Sumber: [www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)

### 2.1.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis	Variabel Penelitian	Hasil
1	(Deiawati , NI LU GD, 2023)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> , Stuktur Kepemilikan Intitusional, Kepemilikan Manejerial, Kepemilkian Keluarga, dan Kepemilikan Asing terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2019-2021.	<i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> berpengaruh terhadap nialai perusahaan, kepemilikan intitusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap niali perusahaan,mkepemilikan keluarga berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
2	(Diftya Rachmitha Hunafah, Siti Farida Zahwa dan Hasnawati, 2022)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Kepemilikan Saham Publik Profitabilitas Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> Selama Masa Pandemi Covid-19	Pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> , sedangkan ukuran perusahaan , kepemilikan saham publik, dan profabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan

No	Nama Penulis	Variabel Penelitian	Hasil
			<i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i>
3	(Duni, 2022)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Publik, ROA, DER Terhadap <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> .	Kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, profitabilitas (ROA), tingkat leverage (DER), secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> . Sedangkan profitabilitas (ROA) berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> .
4	(Bestari, 2022)	Pengaruh Intellectual Capital dan Kepemilikan Publik Terhadap <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> .	Baik variabel intellectual capital maupun variabel kepemilikan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.
5	(Ni Kade Nina Yanti Putri, Dewa Made Endiana, dan Gusti Ayu Asri Pramesti, 2021 )	Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> , dan Investment Opportunity Set Terhadap Kinerja Perusahaan	Struktur kepemilikan institusional dan <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan struktur kepemilikan publik, ukuran perusahaan dan investment opportunity set tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
6	(Rudianti, 2020)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> , Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Intitusional dan Kepemilikan Publik terhadap Nilai Perusahaan	Secara parsial variabel tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sedangkan kepemilikan manajerial, intitusional dan publik

No	Nama Penulis	Variabel Penelitian	Hasil
			tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
7	(Shisombing el al., 2020)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran Komite Audit Terhadap <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i>	Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> . Komite audit berpengaruh terhadap <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i>
8	(Nurkasnah, 2020)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> ( (Studi Empiris pada perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI 2014-2018)	Kepemilikan intitusional berpengaruh positif terhadap <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> . Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> Komite audit berpengaruh psotif terhadap <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> .
9	(Yani & Suputra, 2020)	Pengaruh Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional, dan Leverage Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> .	Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i>
10	(Asnawi asnawi, Ridwan Ibrahim & Mulia Saputra, 2019)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Intitusional dan Kebijakan Hutang terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI)	Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan institusional, dan Kebijakan Hutang secara kebersamaan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan
11	(Wijaya, 2019)	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> , Leverage, dan Kepemilikan Manajeraial Terhadap Agresifvitas Pajak	Penggungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

No	Nama Penulis	Variabel Penelitian	Hasil
			Leverage tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap agresipvitas pajak. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap agresipvitas pajak

Sumber: [www.google.com](http://www.google.com)

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Kepemilikan manajerial membantu perusahaan dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility Disclosure*, dengan mempermudah perusahaan, serta meningkatkan citra perusahaan serta adanya *Corporate Social Responsibility Disclosure* membantu perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial. Rudianti berpendapat adanya hubungan antara kepemilikan manajerial dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Manajerial akan menyusun/mengatur kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan diperusahaan, hal ini akan meningkatkan dan memperluas *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Maka hasil penelitian yang dilakukan Rudianti bahwa, manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* (Rudianti 2020).

Sedangkan Kartika & Yuyetta (2020) berpendapat bahwa kepemilikan manajerial ini dapat memberikan sebuah pengaruh yang cukup kuat untuk menekankan manajemen dalam *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

Semakin besar jumlah kepemilikan manajerial didalam perusahaan maka tingkat pengawasan akan semakin efektif dan luas. Maka hasil penelitian yang dilakukan dapat berppengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

Berbeda dengan bahwa kepemilikan manajerial membuat *Corporate Social Responsibility Disclosure* menjadi lebih luas. Sebab kepemilikan manajerial ini menitik beratkan kepada kepercayaan dan nilai yang bisa diterima oleh perusahaan tanpa *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Maka penelitian ini bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility Disclosure* (Aulia & Aini, 2020).

### **2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure***

Adapun kepemilikan institusional tidak hanya berguna untuk menerapkan *Corporate Social Responsibility Disclosure* saja, institusional juga sangat membantu perusahaan dalam menerapkan tanggung jawab sosial terhadap karyawan serta masyarakat sekitar dalam pelangsungan perusahaan semakin tinggi kepemilikan institusional dalam perusahaan maka *Corporate Social Responsibility Disclosure* akan menurun maupun sebaliknya. Dengan demikian, semakin besar kepemilikan intitusional maka tuntutan untuk perusahaan dalam menghasilkan laba besar, hal ini membuat perusahaan harus merasa terdorong untuk melakukan efisiensi biaya termasuk juga biaya yang akan dikeluarkan untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Maka, hasil penelitian ini menunjukkan

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* Sihombing et al., (2020).

Merujuk penelitian yang dilakukan oleh Sembiring & Tambunan, (2021) semakin besar kepemilikan institusional, diharapkan pihak dari institusional akan melakukan monitor untuk pencegahan pemborosan yang akan dilakukan oleh perusahaan, dan akan membuat pemanfaat secara efisien dalam aktiva perusahaan. Kepemilikan institusional ini akan mendorong perusahaan dalam *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Dengan meningkatnya rasio kepemilikan institusional ini akan mendorong perusahaan dalam *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Dengan meningkatnya rasio kepemilikan institusional pada perusahaan, membuat masyarakat berperan dalam mendorong perusahaan melaksanakan *Corporate Social Responsibility Disclosure* nya. Maka, hasil dari penelitian kepemilikan institusional secara persial berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

Mengacu pada penelitian Anam & Wibisono (2023) dengan memiliki kepemilikan institusional yang besar, hal ini akan mendorong peningkatan *Corporate Social Responsibility Disclosure* didalam perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka dalam *Corporate Social Responsibility Disclosure* juga meningkat, karena ini akan menimbulkan pengawasan yang cukup besar dari pihak investor institusional, sehingga pihak dari stakeholder bisa melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih kuat. Maka penelitian ini, kepemilikan institusional dapat berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

Maka perusahaan intitusi yang memiliki saham yang besar dapat mengawasi dalam pemanfaatan aktiva secara efisiensi, kepemilikan institusional yang tinggi akan berdampak terhadap pengawasan yang lebih besar lagi agar bisa mencegah perilaku-perilaku opportunistic manajer dan juga mendorong dalam hal *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

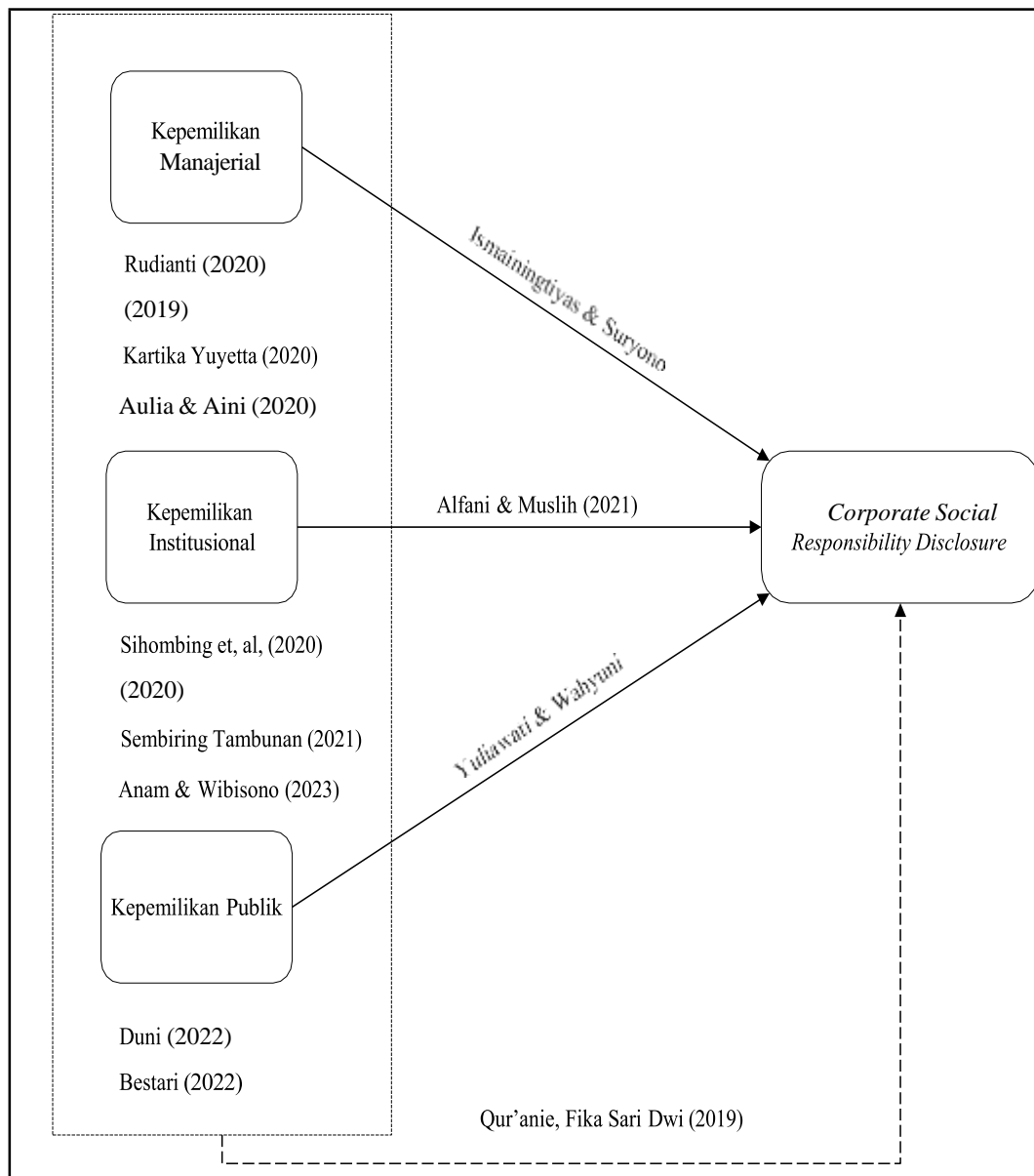
### **2.2.3 Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure***

Dalam kepemilikan publik terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* berguna untuk meningkatkan nya promosi dalam sebuah perusahaan dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility Disclosure*, agar citra perusahaan lebih baik, dengan adanya *Corporate Social Responsibility Disclosure* berdampak sangat baik bagi kepemilikan publik perusahaan. Adapun bahwa kepemilikan publik sering kali melibatkan bagaimana aset atau sumber daya dimiliki dan dikelola oleh masyarakat atau negara, beberapa aspek dalam penelitian ini kepemilikan publik aset atau sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat secara kolektif, seperti tanah infastruktur, dan layanan publik. Kepemilikan publik dan transparansi perusahaaan yang dimiliki secara publik sering kali lebih tertekan dalam menerapkan praktik *Corporate Social Responsibility Disclosure* yang baik akan tuntutan transparansidan akuntabilitas dari para pemegang saham yang regulator. Kepemilikan publik dapat meningkatkan kewajiban perusahaan untuk melaporkan kegiatan *Corporate Social Responsibility Disclosure* secara rinci Duni (2022).

Berdasarkan penelitian Bestari (2022), berpendapat bahwa fokus perusahaan publik *Corporate Social Responsibility Disclosure* sering kali lebih didorong oleh motif ekonomi untuk meningkatkan citra dan mengurangi risiko reputasi dari pada komitmen tulus terhadap tanggung jawab sosial. Meskipun kepemilikan publik dapat meningkatkan laporan *Corporate Social Responsibility Disclosure*, implementasi yang efektif tetap memerlukan komitmen dan sumberdaya yang konsisten. Secara keseluruhan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepemilikan publik memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *Corporate Social Responsibility Disclosure*, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan tekanan pemegang saham. Namun, efektivitas *Corporate Social Responsibility Disclosure* juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti regulasi, komposisi pemegang saham, dan motivasi

### 2.1.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikembangkan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan pembahasan di atas, hipotesis yang akan sesuai dengan Judul penelitian “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Publik Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* (Pada Perusahaan Sektor Energy yang terdaftar di BEI 2020-2023)”

Hipotesis 1: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Hipotesis 2: Kepemilikan Intitusional berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Hipotesis 3: Kepemilikan Publik berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*